

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Febry Perdana Kusuma<sup>1</sup>  
I Nyoman Mahaendra Yasa<sup>2</sup>  
I Ketut Djayastra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
email : [febryperdanakusuma83@gmail.com](mailto:febryperdanakusuma83@gmail.com)

### ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik berupa Laporan Keuangan. Informasi dalam Laporan Keuangan harus bermanfaat. Kualitas informasi Laporan Keuangan dapat menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode. Pengumpulan data melalui kuesioner kepada PPK SKPD Kabupaten Jembrana. Populasi adalah PPK SKPD, sebanyak 39 SKPD dengan penentuan sampel dengan *quota sampling dan purposive sampling* masing-masing 3 responden pada setiap SKPD. Hasil analisis menunjukkan Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Jembrana. Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas informasi LKPD Jembrana melalui variabel intervening, yaitu Sistem Pengendalian Intern.

**Kata Kunci** : kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI, sistem pengendalian intern, kualitas informasi LKPD

### ABSTRACT

Accountability is responsibility form of success of failure of organization mission in reaching its purpose and target as stated previously. The form of government responsibility is monetary report. Information being displayed should be beneficial and can be understood by its users. The quality of monetary report can show the quality of government during a period. Questionnaire is used in collecting the data. Its given toward Financial Management (User Administration Budget, Finance Officer, and Treasurer) on regional work units (SKPD). The population used was the financial manager in each SKPD by sampling with quota sampling and purposive sampling each three respondents in each SKPD. The Quality of Human Resources, Monetary Control, The Use of Information Technology influence indirectly toward The Quality Information of Local Government Monetary Report of Jembrana Regency, through intervening variable that is Intern Control System.

**Keywords** : The Quality of Human Resources, Monetary Control, The Use of Information Technology, Intern Control System, The Quality Information of Local Government Monetary Report.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai kualitas, dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat pada Laporan Keuangan Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) yakni: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara pada tahun 2014 sebesar 14,39 triliun akibat lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi terhadap 519 LKPD, terdapat 6034 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas 519 LKPD di Indonesia tahun 2014 juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6136 kasus senilai 14,39 triliun sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan**  
**Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD di Indonesia Tahun 2014**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (triliun Rp.)
1	Kerugian Daerah	2462	1,55
2	Potensi Kerugian Daerah	343	9,95
3	Kekurangan Penerimaan	911	0,40
4	Sistem Pengendalian Intern	6034	-
5	Administrasi	2387	-
6	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	33	2,49
<b>Total</b>		<b>12170</b>	<b>14,39</b>

Sumber : BPK RI, 2015

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014, dinyatakan bahwa terhadap 504 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 251 entitas, opini Wajar dengan pengecualian (WDP) atas 230 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 19 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan. Meskipun terdapat kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan prosentase opini Tidak Wajar (TW) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Perkembangan opini LKPD di Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Opini LKPD di Indonesia Tahun 2010-2014**

LKPD	OPINI				JUMLAH
	WTP	WDP	TW	TMP	
2010	34	341	26	119	520
2011	67	352	7	97	523
2012	119	320	6	79	529
2013	158	309	10	47	524
2014	251	230	4	19	504

Sumber : BPK RI, 2010 - 2014

Secara garis besar penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2014 antara lain permasalahan pengelolaan akun kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta aset tetap. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK di tiap-tiap LHP antara lain berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran, meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan, menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan *net realizable value*, serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan (BPK RI, IHPS I Tahun 2015).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan. Mengingat karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Weygandt et all (2005) menyatakan jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (*Auditabel*).

Penelitian ini dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014, setelah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011-2013, dan selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini Tidak Wajar (TW) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Peralihan metode pencatatan dari basis kas ke basis akrual sejak tahun 2015 adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi LKPD melalui sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi, Ruang Lingkup, dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, yang terdiri atas 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Objek penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana. Ruang lingkup data yang dianalisis tentang LHP atas LKPD Kabupaten Jembrana dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

### **Jenis dan Sumber Data**

- 1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan penghitungan statistik dan data kualitatif, yaitu data yang berupa pernyataan responden dan pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuesioner.

- 2) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
- a) Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara mendalam mencari informan kunci yang benar-benar dapat dipercaya akan memberikan informasi tentang laporan keuangan pemerintah daerah di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu PPK SKPD dan staf penatausahaan keuangan SKPD.
  - b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### **Identifikasi dan Jenis Variabel Penelitian**

Jenis variabel yang terdapat pada penelitian ini meliputi.

- 1) Variabel Endogen, yaitu sistem pengendalian intern (Y1) dan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y2).
- 2) Variabel Eksogen, yaitu kualitas sumber daya manusia (X1), pengawasan keuangan daerah (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3).
- 3) Variabel Intervening, yaitu sistem pengendalian intern (Y1).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Jembrana. Jumlah SKPD adalah sebanyak 39 SKPD yang terdiri dari, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat,



5 Badan, 10 Dinas, 6 Kantor, 5 Kecamatan, dan 10 Kelurahan. Pengelola Keuangan di masing-masing SKPD berjumlah 5 orang sehingga total populasi sebanyak 195 orang.

Metode Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara *quota sampling dan purposive sampling*. *Quota sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Peneliti menetapkan kuota sebanyak 3 orang untuk masing-masing SKPD. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang digunakan berasal dari sumber atau responden yang memenuhi kriteria. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, dan staf di bidang akuntansi/penatausahaan keuangan. Sampel yang diambil dari masing-masing SKPD sebanyak 3 orang, sehingga dengan jumlah SKPD sebanyak 39 SKPD, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 117 sampel.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap Kepala SKPD, PPK SKPD dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD ini meliputi dinas, badan, kantor, dan bagian pada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Peneliti juga melakukan pengamatan langsung (observasi) ke instansi terkait untuk pengumpulan data-data berkaitan dengan penelitian dan tanya jawab (wawancara) kepada responden yang bersedia diwawancarai mengenai kondisi sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah yang ada di satuan kerja responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Lokasi penelitian terbatas pada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

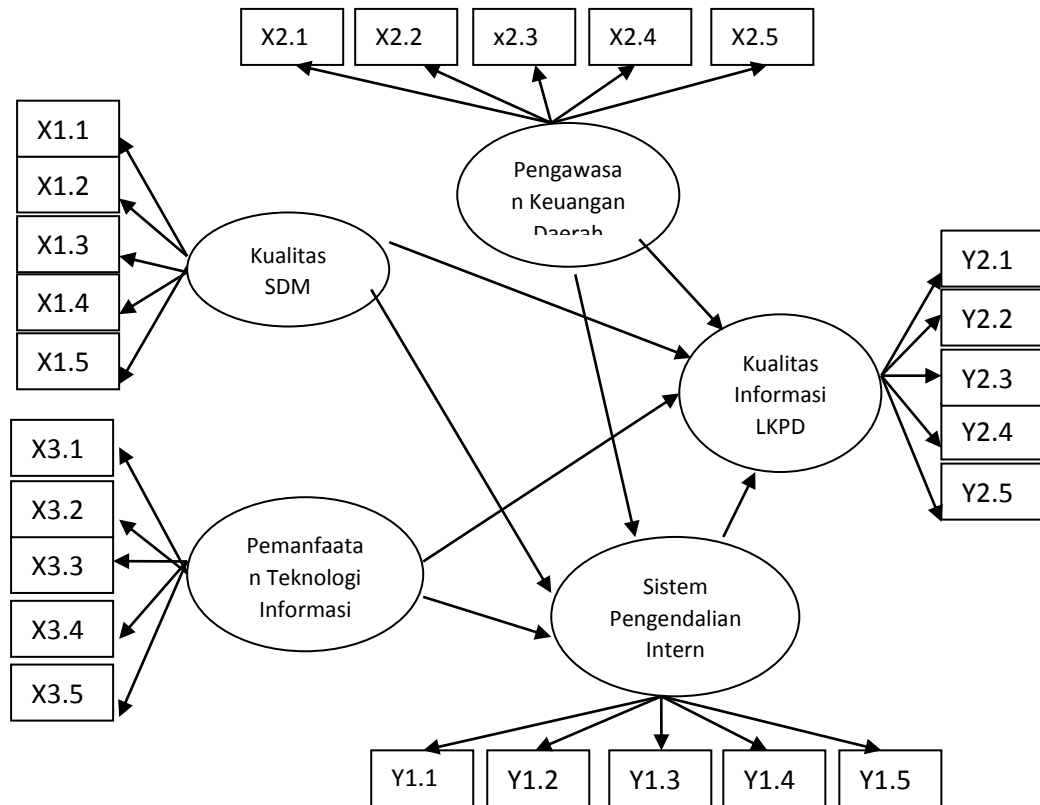
### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain perhitungan rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat atau dengan menggunakan program SPSS dan excel.

#### **Analisis Persamaan Struktural**

Dalam Penelitian ini digunakan analisis persamaan struktural dengan PLS. PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu karena berbasis *statistic nonparametric* dan juga dapat digunakan untuk jumlah sampel relatif kecil (minimal direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100). Pendekatan PLS bersifat *distribution free*, yakni tidak mengasumsikan data harus berdistribusi tertentu, misalnya harus berdistribusi normal. Data yang akan diolah dapat berupa data nominal, ordinal, interval dan rasio. Secara mendasar perbedaan antara *covariance based SEM* dengan *Component Based SEM PLS* adalah penggunaan persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi.



**Gambar 1**  
**Hubungan Antarvariabel Penelitian**

Dengan menggunakan teknik PLS menspesifikasikan hubungan antar variabel, antara lain: 1) *outer model*, 2) *inner model*, dan 3) pengaruh tidak langsung yang diuraikan sebagai berikut:

1) *Outer Model*

*Outer Model* sering juga disebut *measurement model* atau model pengukuran yang merupakan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Sesuai dengan Gambar 1, dalam penelitian ini terdapat lima model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: a) Kualitas SDM, b) Pengawasan Keuangan Daerah, c) Pemanfaatan Teknologi Informasi, d) Sistem Pengendalian Intern, dan e) Kualitas Informasi LKPD.

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

(1) *Convergent Validity* (CV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya. Nilai yang ditoleransi minimal 0,50 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2011). Jika sampel cukup besar, nilai loading yang lebih kecil dari 0,50 juga dapat dipertimbangkan asalkan nilai t hitung tidak kurang dari 1,96.

(2) *Discriminant Validity* (DV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat *crossloading* terhadap konstruk atau latennya. DV yang bagus apabila indikatornya memiliki *crossloading* pada konstraknya lebih besar dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* (DV) adalah dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka konstruk yang bersangkutan dikatakan memiliki *discriminant validity* (DV) yang baik. Direkomendasi bahwa nilai AVE yang lebih besar dari 0,50. Formula menghitung AVE adalah sebagai berikut:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{var}(\varepsilon)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

$\lambda_i$  = *loading factor* ke indikator

$\text{var}(\varepsilon) = 1 - \lambda_i^2$

(3) *Composite Reliability* ( $\rho_c$ ) umumnya digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, di samping *Cronbach Alpha* yang sering digunakan. Dengan output PLS maka *composite reliability* dapat dihitung dengan formula sbb:

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(\varepsilon)} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

$\lambda_i$  = *loading factor* ke indikator

$\text{var}(\varepsilon) = 1 - \lambda_i^2$

## 2) *Inner Model*

Dalam PLS *inner model* juga disebut *inner relation* yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaan dalam penelitian ini sesuai dengan Gambar 4.1 adalah:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

$X_1$  = Kualitas SDM

$X_2$  = Pengawasan Keuangan Daerah

$X_3$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$Y_1$  = Sistem Pengendalian Intern

$Y_2$  = Kualitas Informasi LKPD

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$  = koefisien jalur

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$  = *inner residual*

Evaluasi terhadap *inner model* dilakukan dengan melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya, dan juga nilai uji t statistiknya yang diperoleh dengan metode *bootstrapping*. Di samping itu juga diperhatikan  $R^2$  untuk variabel laten *dependen*. Nilai  $R^2$  sekitar 0,67 dikatakan baik, sebesar 0,33 dikatakan

moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah. Perubahan R<sup>2</sup> dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten tertentu terhadap variabel laten *independen* apakah memiliki pengaruh yang substantif.

Selain R<sup>2</sup> model PLS juga dapat dievaluasi kemampuan prediksinya atau *predictive prevelance* melalui *Stone-Geiser Q Square test* (Ghozali,2011), dengan formula:

$$Q^2 = \frac{\sum D E_D}{\sum D O_D} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

D = *omission distance*

E = jumlah kuadrat prediksi

O = jumlah kuadrat observasi

Nilai Q<sup>2</sup> juga dapat diperoleh dengan formula:

$$Q^2 = 1-(1-R_1^2)(1-R_2^2) \dots\dots\dots(6)$$

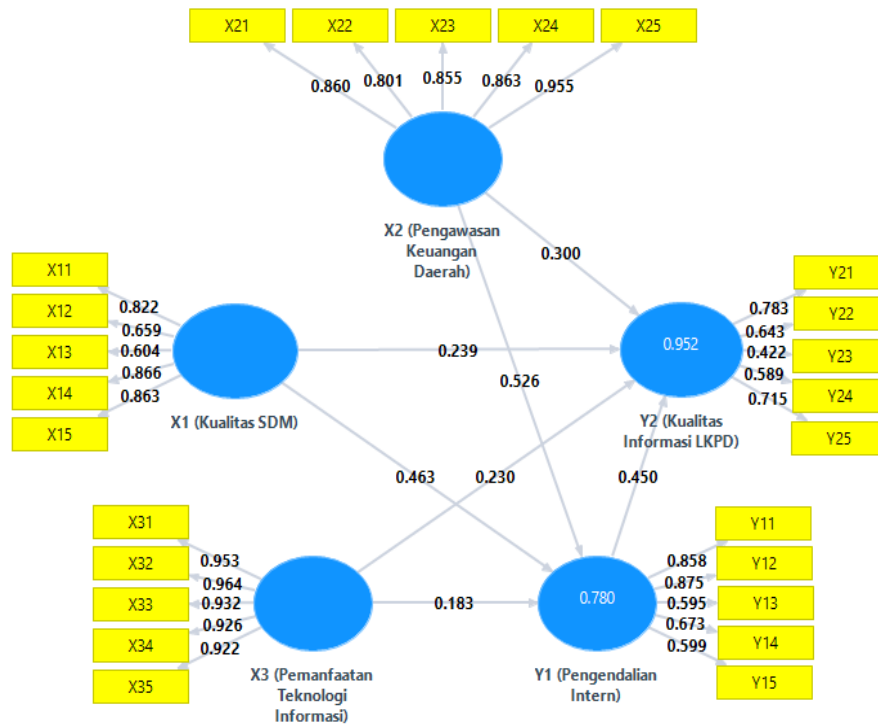
Nilai Q<sup>2</sup> yang memiliki nilai diatas nol memberikan makna bahwa model yang dibuat memiliki *predictive prevalence*, sebaliknya nilai Q<sup>2</sup> dibawah nol memberikan makna bahwa model yang dibuat kurang memiliki *predictive prevalence*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis dengan PLS ada 2 hal yang dilakukan, pertama, menilai *outer* model atau *measurement* model adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. *Full Model* dari faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil perhitungan PLS dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2

Full Model dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

1) Uji Validitas Outer Model

Untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan untuk membentuk konstruk atau variabel laten adalah valid, maka dilakukan analisis sebagai berikut.

a) Convergent Validity

Hasil Output PLS ( Partial Least Square ) mengenai convergent validity disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3

Outer Loading Indikator terhadap Konstruk Kualitas SDM (X1), Pengawasan Keuda(X2), Pemanfaatan TI (X3), Sistem Pengendalian Intern (Y1) dan Kualitas Informasi LKPD (Y2) Kabupaten Jembrana.

Hubungan Antar Variabel	Loading	Sterr	T statistic	P value
-------------------------	---------	-------	-------------	---------

X1.1<-Kualitas SDM(X1)	0.822	0.049	16.923	0.000
X1.2<-Kualitas SDM(X1)	0.659	0.077	8.548	0.000
X1.3<-Kualitas SDM(X1)	0.604	0.083	7.269	0.000
X1.4<-Kualitas SDM(X1)	0.866	0.040	21.640	0.000
X1.5<-Kualitas SDM(X1)	0.863	0.042	20.639	0.000
X2.1<-Pengawasan Keuda (X2)	0.860	0.028	30.751	0.000
X2.2<-Pengawasan Keuda (X2)	0.801	0.048	16.849	0.000
X2.3<-Pengawasan Keuda (X2)	0.855	0.040	21.468	0.000
X2.4<-Pengawasan Keuda (X2)	0.863	0.026	33.770	0.000
X2.5<-Pengawasan Keuda (X2)	0.955	0.007	131.512	0.000
X3.1<-Pemanfaatan TI (X3)	0.953	0.012	81.328	0.000
X3.2<-Pemanfaatan TI (X3)	0.964	0.009	113.512	0.000
X3.3<-Pemanfaatan TI (X3)	0.932	0.013	73.115	0.000
X3.4<-Pemanfaatan TI (X3)	0.926	0.016	58.606	0.000
X3.5<-Pemanfaatan TI (X3)	0.922	0.015	63.568	0.000
Y1.1<-Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.858	0.025	34.114	0.000
Y1.2<-Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.875	0.030	29.056	0.000
Y1.3<-Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.595	0.106	5.615	0.000
Y1.4<-Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.673	0.069	9.753	0.000
Y1.5<-Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.599	0.089	6.709	0.000
Y2.1<-Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.783	0.041	19.198	0.000
Y2.2<-Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.643	0.069	9.324	0.000
Y2.3<-Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.422	0.117	3.596	0.000
Y2.4<-Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.589	0.085	6.926	0.000
Y2.5<-Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.715	0.061	11.783	0.000

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk konstruk Kualitas SDM (X1), Pengawasan Keuangan Daerah (X2), Pemanfaatan TI (X3), Sistem Pengendalian Intern (Y1) dan Kualitas Informasi LKPD (Y2) secara statistik adalah signifikan dengan nilai t hitung lebih besar dari 1,96 dengan p value sebesar 0,000. Demikian juga nilai *loading* semuanya diatas 0,50. Ini berarti bahwa konstruk yang dibuat telah memenuhi syarat *convergent validity*.

#### b) *Discriminan Validity*

Untuk mengetahui validitas suatu konstruk juga dapat dilihat dari *Discriminan Validity (DV)*. *Discriminan validity* pada indikator reflektif adalah dengan melihat *crossloading* indikator terhadap konstruk atau latennya. DV yang



bagus yang mana indikatornya memiliki *crossloading* pada konstruknya lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat dari *discriminant validity* (DV) melalui *Average Variance Extracted* (AVE), *composite reliability* ( $\rho_c$ ) umumnya digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, dan *Cronbach Alpha*. Hasil olahan datanya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4  
*Average Variance Extracted* (AVE), *composite reliability* ( $\rho_c$ ) dan *Cronbach Alpha* Konstruk Kualitas SDM, Pengawasan Keuda, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana

Variabel Konstruk	<i>Average Variance Extracted</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
Kualitas SDM (X1)	0.594	0.878	0.822
Pengawasan Keuda (X2)	0.754	0.938	0.917
Pemanfaatan TI ( X3)	0.882	0.974	0.967
Sistem Pengendalian Intern (Y1)	0.533	0.847	0.771
Kualitas Informasi LKPD (Y2)	0.413	0.772	0.632

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa konstruk Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Informasi LKPD sangat bagus, karena memiliki *discriminant validity* yang lebih besar dari 0,50 untuk *Average Variance Extracted* (AVE). Sedangkan *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* diatas 0,50 untuk semua konstruk.

## 2) Uji Inner Model

Uji *Inner Model* yang disebut juga pengujian antar konstruk pertama-tama dilakukan dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji, seperti yang disajikan pada Tabel 5.13.

Dalam PLS *inner model* juga disebut *inner relation* yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaan dalam penelitian ini adalah.

$$Y_1 = 0.042 X_1 + 0.046 X_2 + 0.089 X_3 \dots\dots\dots(7)$$

$$Y_2 = 0.032 X_1 + 0.036X_2 + 0.048 X_3 + 0.095Y_1 \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan :

- X<sub>1</sub> = Kualitas SDM
- X<sub>2</sub> = Pengawasan keuangan daerah
- X<sub>3</sub> = Pemanfaatan TI
- Y<sub>1</sub> = Sistem Pengendalian intern
- Y<sub>2</sub> = Kualitas informasi LKPD
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, ...β<sub>7</sub> = koefisien jalur
- ε<sub>1</sub>, ε<sub>2</sub> = *inner residual*

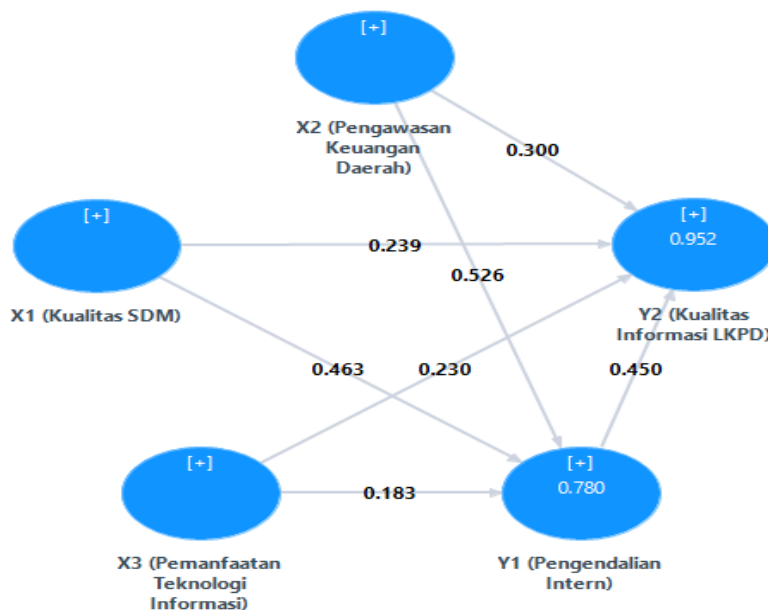
**Tabel 5**  
**Pengaruh Langsung Antar Variabel**

Hubungan Antar Variabel	<i>Loading</i>	<i>Sterr</i>	T statistic	<i>ρ value</i>	Ket
(X1) → (Y1)	0.463	0.042	11.117	0.000	Sig
(X1) → (Y2)	0.239	0.045	5.283	0.000	Sig
(X2) → (Y1)	0.526	0.046	11.339	0.000	Sig
(X2) → (Y2)	0.300	0.054	5.543	0.000	Sig
(X3) → (Y1)	0.183	0.089	2.064	0.040	Sig
(X3) → (Y2)	0.230	0.038	6.004	0.000	Sig
(Y1) → (Y2)	0.450	0.095	4.752	0.000	Sig

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa semua konstruk berhubungan positif dan signifikan dengan probabilitas kurang dari 1 persen. Variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y1) di Kabupaten Jembrana adalah Pengawasan Keuangan Daerah (X2) dengan nilai *loading* sebesar 0.526. Kemudian diikuti oleh variabel Kualitas SDM (X1) dengan nilai *loading* sebesar 0.463 dan variabel Pemanfaatan TI (X3) dengan nilai *loading* sebesar 0.183. Variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap Kualitas Informasi LKPD (Y2) di Kabupaten

Jembrana adalah Sistem Pengendalian Intern (Y1) dengan nilai *loading* sebesar 0.450. Kemudian diikuti oleh variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X2) dengan nilai *loading* sebesar 0.300. Kemudian diikuti oleh variabel Kualitas SDM (X1) dengan nilai *loading* sebesar 0.239 dan variabel Pemanfaatan TI (X3) dengan nilai *loading* sebesar 0.230. Hubungan langsung antar variabel juga dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3**  
Pengaruh Langsung antar Variabel

Validitas model struktural atau *inner model* dapat dilihat dari  $R^2$  dan variabel konstruk dependen dan  $f^2$ . Untuk  $R^2$  dalam penelitian ini terdapat tiga konstruk independen, yaitu Kualitas SDM (X1), Pengawasan Keuangan Daerah (X2), Pemanfaatan TI (X3). Dilihat dari nilai  $R^2$  untuk Y1 sebesar 0.780 sedangkan Y2 sebesar 0.952. Karena  $R^2$  lebih besar dari 0,67 (sesuai dengan standard jika nilai  $R^2$  sekitar 0,67 dikatakan baik, sebesar 0,33 dikatakan moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah), maka validitas model struktural dikatakan baik, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengaruh variabel laten tertentu terhadap variabel laten *independen* memiliki pengaruh yang substantif.

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1-(1-R_1^2)(1-R_2^2) \\ &= 1-(1-0.780)(1-0.952) \\ &= 1- 0,011 \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

Dari hasil  $Q^2$  diperoleh nilai sebesar 0,99 dan dapat disimpulkan bahwa 99 persen kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana di pengaruhi oleh kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI, melalui mediasi variabel sistem pengendalian intern, sedangkan sisanya sebesar 0,01 atau 1 persen di pengaruhi oleh faktor-faktor lain.

#### **Pengaruh Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan TI terhadap Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian intern di Kabupaten Jembrana dengan koefisien regresi 0.463. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang diwakili oleh responden menentukan sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana.

Hasil hipotesis menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian intern di Kabupaten Jembrana dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.526. Ini berarti adanya upaya perbaikan sistem pengendalian intern melalui pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana dengan koefisien regresi 0.183. Ini berarti adanya upaya perbaikan pengendalian intern melalui pemanfaatan TI.

**Pengaruh Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana.**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana dengan koefisien regresi 0.239. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang diwakili oleh responden menentukan kualitas informasi LKPD yang dihasilkan yang akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK-RI.

Hasil hipotesis menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.300. Ini berarti pengawasan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan dan dalam penyusunan LKPD menentukan kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana dengan koefisien regresi 0.230. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas informasi LKPD melalui pemanfaatan TI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana dengan koefisien regresi 0.450. Ini berarti adanya

upaya perbaikan kualitas informasi LKPD melalui sistem pengendalian intern.

### **Pengaruh Tidak Langsung**

Pengaruh tidak langsung antar variabel dapat dilihat dari hasil analisis *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung antar variabel yang tersaji pada Tabel 6 dan hubungan tidak langsung variabel *eksogen* terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui peran mediasi pengendalian intern.

Tabel 6  
Hubungan Tidak Langsung/ *indirect effects* antar variabel

Hubungan Antar Variabel		Original sampel	Sterr	T statistic	P value
(X1)	→ (Y2)	0.208	0.050	4.141	0.000
(X2)	→ (Y2)	0.237	0.059	4.009	0.000
(X3)	→ (Y2)	0.082	0.037	2.234	0.026

Sumber : Data Diolah, 2016

Variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap Kualitas Informasi LKPD (Y2) di Kabupaten Jembrana melalui peran mediasi Sistem Pengendalian Intern (Y1) adalah variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X2) dengan nilai *loading* sebesar 0.237. Kemudian diikuti oleh variabel Kualitas SDM (X1) dengan nilai *loading* sebesar 0.208 dan variabel Pemanfaatan TI (X3) dengan nilai *loading* sebesar 0.082.

### **Pengaruh Tidak Langsung Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui Sistem Pengendalian Intern.**

Hasil penelitian pengaruh tidak langsung variabel kualitas SDM terhadap variabel kualitas informasi LKPD melalui satu variabel intervening yaitu sistem pengendalian intern dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.208. Ini berarti bahwa variabel kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan secara tidak

langsung terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern.

Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern. Hal ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0.237. Ini berarti pengawasan keuangan daerah dalam penyusunan LKPD Kabupaten Jembrana yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas informasi LKPD yang dihasilkan.

Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern. Ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0,082. Ini berarti pemanfaatan TI dalam penyusunan LKPD Kabupaten Jembrana yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas informasi LKPD yang dihasilkan.

### **Pengaruh Kualitas SDM terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana.**

Hasil analisis dalam penelitian ini yang menyatakan pengaruh kualitas SDM terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana sejalan dengan hasil penelitian oleh Widiastuti (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai LKPD. Sebaliknya penelitian

ini tidak sejalan dengan penelitian Sri Wardani (2013) yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara SDM dengan kualitas laporan Keuangan.

Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Jembrana dilihat dari pendidikan memang sudah memadai dari data pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana 246 orang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Namun dari 39 SKPD hanya 76 orang atau 30,9 persen yang menjadi satuan pengelola keuangan daerah. Ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia untuk satuan pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD dilihat dari segi latar belakang pendidikan belum optimal.

Pengelola Keuangan di masing-masing SKPD dilihat dari segi umur lebih banyak berada pada umur diatas 40 tahun, sehingga untuk berinteraksi dengan sistem yang ada cenderung kurang optimal karena daya ingat dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi sudah semakin menurun. Untuk mengoptimalkan interaksi dengan sistem memerlukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana.**

Hasil hipotesis menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang disimpulkan oleh Nugraheni (2008) bahwa penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu hasil penelitian ini juga



sama dengan penelitian yang dibuktikan oleh Roviyantie (2011) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Jembrana dilihat dari hasil distribusi responden sudah menunjukkan peningkatan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Perlu dilakukan evaluasi yang terjadwal sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### **Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas informasi LKPD melalui pemanfaatan TI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dimana semakin baik pemanfaatan sistem informasi teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas LKPD yang dihasilkan. Penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian Indriasari (2008) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Ayu Darmayani (2014) yang membuktikan bahwa Pengaruh Penerapan SIPKD terhadap Nilai Laporan

Keuangan. Hasil analisis data secara statistik membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel penerapan TI.

Pemanfaatan TI dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta pemeliharaan sistem dan jaringan harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi LKPD Kabupaten Jembrana.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Jembrana. Ini berarti upaya peningkatan kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana dilakukan melalui sistem pengendalian intern..

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dibuktikan oleh Sri Wardani (2013) bahwa Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan oleh penelitian Ari Udiyanti (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD.

#### **Pengaruh Kualitas SDM terhadap Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas SDM menentukan sistem pengendalian intern di

Kabupaten Jembrana, dengan kata lain sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana sangat dibantu oleh adanya kualitas SDM.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas SDM yang unggul akan mempengaruhi kinerja organisasi maka akan juga berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern pada organisasi tersebut. Ini menandakan bahwa kualitas SDM dapat meningkatkan sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana.

#### **5.4.3 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana. Ini berarti adanya upaya perbaikan sistem pengendalian intern melalui pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan keuangan daerah yang baik akan meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan sehingga sistem pengendalian intern pada organisasi tersebut juga akan berjalan dengan baik. Ini menandakan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan dipercaya mampu meningkatkan sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari BPK-RI.

#### **Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana. Ini berarti adanya upaya perbaikan sistem pengendalian intern melalui pemanfaatan TI.

Pemanfaatan TI memiliki peran dalam meningkatkan kinerja pada organisasi karena melalui pemanfaatan TI yang baik maka proses pengolahan data dan laporan yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat terselesaikan secara tepat waktu dan meminimalisir terjadinya suatu kesalahan pencatatan sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian intern organisasi.

### **Pengaruh Tidak Langsung Kualitas SDM terhadap Kualitas Informasi LKPD melalui Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil Penelitian pengaruh tidak langsung variabel bebas (Kualitas SDM) dengan satu variabel terikat (Kualitas Informasi LKPD) melalui satu variabel perantara (Sistem Pengendalian Intern) dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa variabel kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Rahmawati, Celviana (2010), yang menyimpulkan bahwa pengaruh SDM terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah melalui sistem pengendalian intern akuntansi. Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) (dalam Indriasari 2008) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara SDM dengan keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah melalui pengendalian intern akuntansi.

### **Pengaruh Tidak Langsung Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi LKPD melalui Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah yang baik dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori Permendagri 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang didalamnya memuat bahwa teknologi informasi dan sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.. Sama halnya dengan penelitian Komang Sartika Dewi, Wayan Cipta, dan I Wayan Bagia (2014) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng

#### **Pengaruh Tidak Langsung Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Informasi LKPD melalui Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jembrana.**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana melalui sistem pengendalian intern. Ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Jembrana harus didukung dengan sistem pengendalian intern. Kuat atau lemahnya sistem pengendalian intern yang dimiliki akan dapat mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dinyatakan oleh Yosefrinaldi (2008) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana. Kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Jembrana. Ada pengaruh tidak langsung kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi LKPD melalui sistem pengendalian intern di Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka dalam penempatan pegawai hendaknya menyesuaikan dengan kualitas yang dimiliki (*The right man on the right place*) dan kebutuhan organisasi khususnya yang mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengelola keuangan

sehingga paham terhadap tupoksinya. Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk pengelola keuangan SKPD perlu diberikan pelatihan dan Bimtek yang berkelanjutan sehingga pemahaman terhadap peraturan dan standar penyusunan laporan keuangan lebih optimal dan dapat meningkatkan interaksi dengan sistem pengelola keuangan yang ada. Formasi kebutuhan pegawai yang direncanakan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil, agar lebih banyak mencari SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan LKPD diperlukan pengawasan keuangan daerah oleh inspektorat dalam bentuk pendampingan kepada SKPD yang bertujuan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah setiap periode sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam hal ini Inspektorat untuk lebih mengoptimalkan dan berkelanjutan melalui pembinaan dan pengawasan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu diperlukan evaluasi terjadwal terhadap proses pengawasan khususnya di bidang keuangan daerah. Pemanfaatan TI dalam hal ini sistem aplikasi SIADINDA yang ada dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta dalam pelaporan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam perencanaan anggaran supaya memprioritaskan anggaran pengadaan dan pemeliharaan rutin sarana

prasarana penunjang seperti komputer, jaringan online dan jaringan internet pada masing-masing SKPD sehingga mampu berinteraksi dengan sistem untuk menghasilkan data secara cepat, tepat dan akurat. Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD. Perlu rancangan sistem pengendalian intern yang memadai pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam bentuk integritas data, ketepatan posting data, maupun prosedur otorisasi sehingga pihak pengelola keuangan dapat bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD. Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

## REFERENSI

- Alamsyah, A.W. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan di Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bondowoso).(skripsi). Universitas Jember.
- Andreica, Alina.et all 2009. Information System For Financial and Administrative Management. Case Study on Babes-Bolya University, *journal studia Europae*: h; 59-76
- Arad, hamed dan Hoda Arad, 2009. *Information an Internal Controls*. Dalam *SSRN Digital Library, Information Systems and Technology USA*
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (skripsi). Universitas Diponegoro.
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi). (skripsi). Universitas Negeri Padang



- Ari Udiyanti, 2014 “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah” ( studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng).(tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Badan Pemeriksa Keuangan RePublik Indonesia, 2015 IHPS I Tahun 2015 *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota tahun 2010-2014*
- Badan Pemeriksa Keuangan RePublik Indonesia, 2015 *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi Bali tahun 2014*
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Bharadwaj, 1999. A. *Resource-based Persepective on Information Technology Copability and Firm Performance: An Emperial Investigation*, MIS Quarterly
- Darmayani, Ayu. 2014. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Doyle J w Ge & Mac Vay. 2006. Determinan of Weakness in Internal Controler Financial Reporting. *Journal of accounting and economic*.
- Eko Fauzi Saputra. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Internal Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sumatra Utara.
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Lapotan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. (tesis). Denpasar. Universitas Udayana.
- Freeman, Robert J., and Shoulder, Craig D..(2008). *Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Practice*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Internation.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelin Metode Alternative dengan Partial Least Square*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glazer, Amihai & Kondo, Hiroki. 2007. Migration In Search Of a Good Government. *Journal regional science and urban economics* 37: p; 703-716

- Hendrawansyah, 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Henley, D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control*. Fourth Edition. Chapman & Hall.
- Holbert, R Lance and Michael T. Stephenson, 2003. The Important Indirect Effect in Media Effect: Testing For Mediation in Structural Equation Modeling. *Journal Broadcasting & Electronic Media*. Desember 2003.
- Imam Mulyono, 2009. *Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. SNA XII. Palembang.
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNA XI. Pontianak.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. 1996. *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. London: Pitman
- Komang Sartika Dewi, Wayan Cipta, I Wayan Bagia. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Vol 2*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lillrank, Paul. 2003. "The quality of information", *International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 20 No. 6* pp. 691-703.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1*, Hal. 1-17.
- Martiningsih, Sri Pancawati, 2009. Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Mataram.
- Nugraha, Darya setya dan Apriyanti susanti. 2010. The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2*, h. 259-280
- Parker, Marilyn M., Robert J. Benson, dan H. E. Trainor, (1988), *Information Economics, Linking Business Performance to Information Technology*. Prentice Hall, A Pearson Education Company.

- Pinnuck, Matt & Potter, Bradley N. 2009. The Quality and Conservatism Of The Accounting Earnings Of Local Government. *J.Account.Public Policy* 28: p; 525-540
- Rachmawati, D., dan F. Wulani. 2004. "Human Capital dan Kinerja Daerah: Studi Kasus di Jawa Timur", *Penelitian APTIK*, April: 1-73.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian pemerintah
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengawasan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
- Retno Yulianti, Jaka Winarna, Doddy Setiawan. 2007. *Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah*. SNA X. Makasar.
- Roviyantie, Devi. 2012. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" ( survey pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya).
- Sharma, Vineeta., and Naiker, Vic., and Lee, Barry. 2009. Determinant of Audit Committee Meeting Frequency: Evidence from a Voluntary Governance System. *Accounting Horizons Vol. 23, No. 3* pp. 245-263.
- Sri Wardani. 2013. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengelolaan asset terhadap kualitas laporan keuangan" ( studi empiris pada Pemerintah Provinsi NTB). (*skripsi*). Universitas Mataram.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

- Suyana Utama, Made. 2014. *Modul Metode Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Tantriani Sukmaningrum, Puji Harto. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*
- Udiyanti, Ari. 2014. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah" ( studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng) (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. ANDI, Yogyakarta.
- Warren, S.Carl., and Reeve, M.James., and Fess, E.Philip. 2005. *Corporate Financial Accounting*. South Western: Thomson.
- Weygandt, J.J., et al. (2005). *Accounting principles*. New York: John Wiley & Sons.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Dan Keterandalan Pelaporan Keuangan*. SNA XIII. Purwokerto.
- Yosefrinaldi, 2011. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( studi empiris pada DPKAD se-Sumatra Barat). *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Yudianta Agus, Ni Made Adi Erawati. 2012. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan informasi teknologi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Zarah Puspitaningtyas. 2012. Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya Bagi Investor. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Universitas Jember.